

PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT

Area 'Gumaton' Jadi Prioritas Pengawasan

YOGYA (KR) - Terhitung sejak kemarin (11/1), kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat resmi diberlakukan. Area Tugu, Malioboro dan Kraton (Gumaton) menjadi salah satu prioritas pengawasan seiring tingginya tingkat aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, mengaku pihaknya tetap mengedepankan persuasi dalam mengawal kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. "Tidak hanya Kota Yogya tapi semua kabupaten di DIY juga melakukan hal sama. Kita sudah memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan ini secara baik," tandasnya, Senin (11/1).

Menurutnya, masyarakat sudah memahami kebijakan yang diberlakukan hingga 25 Januari 2021 mendatang. Oleh karena itu, baik pelaku usaha, perkantoran maupun aktivitas harian lain di luar rumah seharusnya mampu mematuhi dengan baik.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir, meski aktivitas dibatasi namun hal yang bersifat esensial tetap berjalan seperti biasa. Di antaranya menyangkut kebutuhan pokok, energi, kesehatan dan lainnya.

Agus menjelaskan, area Gumaton sejauh ini menjadi daya tarik masyarakat. Selama pandemi tingkat kunjungan dari warga luar daerah juga tergolong tinggi. Sehingga agar kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat berjalan optimal maka pengawasan di area Gumaton juga perlu ditingkatkan. "Pengawasan tidak hanya dilakukan tim dari kota, namun juga dibantu dari DIY. Sudah kami ter-

junkan tim yang sifatnya mobile di kawasan Gumaton," imbuhnya.

Pengawasan tidak terbatas pada pukul 19.00 WIB saat sebagian besar aktivitas harus dihentikan, melainkan juga terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Terhadap pihak yang diketahui tidak mengindahkan aturan, petugas hanya akan memberikan teguran dan sosialisasi. Namun jika lain waktu masih melanggar, maka surat peringatan akan diberikan. "Misal jika itu usaha dan sampai tiga kali surat peringatan masih tidak patuh, akan kita minta tutup dulu," katanya.

Dirinya berharap, wisatawan yang tengah berkunjung di Kota Yogya selama masa pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat, mampu mendukung dan memahami aturan tersebut. Agus mengaku, pengendalian kasus Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan semua elemen masyarakat. (Dhi)-d



KR - Ardhi Wahdan

Area Tugu yang selama ini menjadi salah satu titik keramaian, kini masuk dalam salah satu tempat prioritas pengawasan.

DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19

Perekonomian di DIY Alami Kontraksi 6,74 %

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak cukup serius di bidang ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bahkan dampak dari pandemi tersebut tidak hanya terjadi di level nasional, tapi juga di daerah termasuk DIY. Untuk DIY sendiri, kondisi perekonomian mengalami kontraksi cukup dalam di angka 6,74 persen dengan pencapaian di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X ketika menerima Tim Pemeriksa Pendahuluan Kinerja Pariwisata DIY oleh BPK RI Perwakilan DIY, yang dipimpin Jariyatna di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (11/1). Dalam pertemuan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna selain menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa juga menyerahkan hasil pantauan BPK kepada Wakil Gubernur DIY.

Menurut Wagub DIY, pemeriksaan kinerja pariwisata yang dilakukan

BPK nantinya dapat melihat upaya pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi melalui pariwisata. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan bisa menjadi acuan. Selain itu rekomendasi yang diberikan nantinya akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan kualitas pariwisata di DIY.

Hal itu penting karena pemulihan ekonomi DIY berpijak pada salah satu keunggulan DIY yaitu pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik yang saat ini bertambah, menjadi pendukung perekonomian.

"Pandemi Covid-19 membuat pemulihan pariwisata DIY tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena saat ini ada perubahan preferensi wisatawan pada fase normal dimana wisatawan lebih mengutamakan faktor higienitas baik pada akomodasi, tempat wisata dan amenitasnya," terangnya.

Sedangkan Jariyatna mengatakan, mulai tahun ini BPK melakukan Pemeriksaan LKPD Instansi Tahun

Anggaran 2019/2020 dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Kinerja Pariwisata dan instansi terkait lainnya di DIY. Bahkan pemeriksaan yang sama telah dilakukan tahun lalu di 5 Provinsi bersamaan dengan pemeriksaan Keuangan LKPD dibarengkan dengan pemeriksaan Kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan harapan BPK akan memberikan nilai tambah pada penyerahan laporan opini maupun dalam laporan keuangan dari hasil pemeriksaan tersebut.

"Mengapa dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK. Karena untuk meningkatkan manfaat pemeriksaan dan tema yang dipilih Pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut OPD di provinsi maupun di Kabupaten/Kota kami minta memberikan data yang komprehensif. Mengingat bidang pariwisata mengelola anggaran terbesar dibanding bidang lainnya. Sehingga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuhnya perekonomian," paparnya. (Ria)-d

WFH 50 PERSEN, TAK ADA KENDALA LAYANAN

Jam Pendaftaran Puskesmas Berubah

YOGYA (KR) - Jam layanan pendaftaran di puskesmas mengalami perubahan selama dua pekan ke depan. Meski demikian tidak ada kuota harian sepanjang pasien masih mendaftar sesuai jam yang ditentukan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menjelaskan perubahan pelayanan hanya pada jam pendaftaran. Sedangkan layanan lainnya masih tetap diberikan seperti semula. "Tidak ada pembatasan kuota pasien harian. Yang penting masih di jam pendaftaran, maka tetap diterima," jelasnya, Senin (11/1).

Jam pendaftaran pasien di puskesmas tersebut diajukan 30 menit. Pada Senin sampai Kamis pukul 07.30-10.30 WIB, Jumat pukul 07.30-09.30 WIB, dan Sabtu

pukul 07.30-10.00 WIB. Sedangkan untuk layanan gawat darurat di puskesmas, sepanjang masih jam layanan juga tetap diberikan. Akan tetapi jika sudah tutup, dialihkan ke layanan PSC 119.

Sementara Kepala Puskesmas Gedongtengen Tri Kusumo Bawono, mengaku pada hari pertama kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat kemarin, jumlah pasiennya turut berkurang. Jika biasanya berkisar 100 hingga 150 pasien perhari, kemarin tercatat hanya sekitar 80 pasien. "Meski ada kebijakan work from home (WFH) sebanyak 50 persen, namun semua pasien mampu terlayani tanpa ada kendala. Jumlah pasien juga berkurang, mungkin ya karena WFH juga," katanya.

Dirinya pun mendukung penuh

upaya WFH tersebut. Hal ini karena pegawainya bisa memiliki waktu istirahat yang cukup sekaligus mengurangi paparan Covid-19. Waktu istirahat yang cukup bagi tenaga medis bisa berdampak positif bagi peningkatan imunitas. Apalagi belakangan ini banyak terjadi temuan kasus baru sehingga tim medis juga harus mencurahkan waktu dan tenaganya.

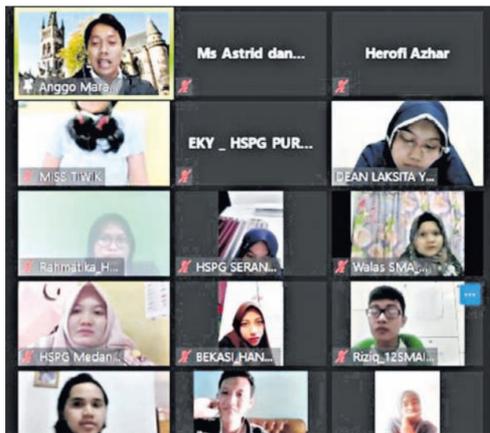
"Harapan kami dengan WFH ini bisa menurunkan kasus penularan dan memutus mata rantai. Covid-19 sekarang banyak sekali dan itu nyata," tandasnya.

Terkait layanan di puskesmas, dia akui tetap berjalan seperti biasa kecuali jam pendaftaran yang dimajukan. Layanan itu antara lain poliklinik umum, poli gigi, kesehatan ibu dan anak serta laboratorium. (Dhi)-d

SIAPKAN SISWA MASUKI SEMESTER GENAP HSPG Adakan MOS Secara Virtual

YOGYA (KR) - HSPG (Home Schooling Primagama) Pusat mengadakan kegiatan Motivation Of Students (MOS), 7-8 Januari 2021. Kegiatan diikuti seluruh siswa jenjang setara SD, SMP dan SMA secara daring lewat zoom meeting, baik siswa HSPG pusat maupun cabang seperti HSPG Manado, Madiun, Bekasi, dan lainnya.

Koordinator MOS HSPG Pusat, Astrid Rosaria SPsi mengatakan, MOS dibagi dua sesi, yaitu sesi materi psikologi dan akademis. "Tujuan MOS untuk menyiapkan siswa agar siap memasuki semester genap, yakni siap secara psikis juga akademiknya," terang Astrid kepada KR di Kampus HSPG Pusat, Senin (11/1). Menurut Astrid, selama libur antarsemester kemarin ditambah masih dalam suasana pandemi, semangat belajar siswa tentu mengalami penurunan. Sehingga perlu dibangkitkan kembali melalui kegiatan MOS ini. Sebagai narasumber MOS yaitu Ge-



KR-Devid Permarna

MOS virtual diikuti siswa HSPG.

neral Manager HSPG Anggo Marantika MSc serta menghadirkan psikolog remaja.

Untuk jenjang setara SD, lanjut Astrid, materi MOS lebih menekankan membahas tentang cita-cita dan kesuksesan. Sedangkan jenjang SMP, lebih mengenalkan tentang konsep diri, perilaku baik dan buruk, sehingga diharapkan siswa tahu perbuatan yang boleh dilakukan

dan tidak. Untuk jenjang SMA, materi MOS lebih mengajak siswa untuk berani bermimpi, punya harapan dan berusaha sekuat tenaga mewujudkan cita-cita.

"Pembelajaran di semester genap masih dilaksanakan secara daring. Setelah mengikuti MOS, diharapkan siswa kembali bersemangat mengikuti pembelajaran" pungkasnya. (Dev)-d

PTKM Tidak Mempengaruhi Penyaluran BST

YOGYA (KR) - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 10 tidak akan terganggu dengan diberlakukannya Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY, Senin - Senin (11-25/1). Untuk itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak perlu khawatir penyaluran BST tahap 10 yang dipastikan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

"Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penyaluran bantuan sosial (bansos), salah satunya BST ini agar segera dibayarkan dan direalisasikan. Kantor Pos pun kembali dipercaya pemerintah sebagai salah satu lembaga penyaluran BST di DIY. Program BST ini harus segera disalurkan meskipun PTKM di DIY," tutur Kepala Kantor Kantor Pos Yogyakarta Arif Yudha Wahyudi di Yogyakarta, Senin (11/1).

Menurutnya ada 120.000 KPM di DIY yang mendapatkan bansos melalui Kantor Pos dengan mayoritas penyalurannya dilakukan di setiap komunitas yang ada di desa atau kecamatan. Pihaknya sendiri melayani penyaluran BST bagi sekitar 60.000 KPM. Sehingga

penyaluran BST dipastikan tetap berjalan seperti biasa dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Caranya dengan membagi jadwal agar masyarakat tidak berkerumun karena sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di DIY," tandasnya.

Pihaknya menargetkan penyaluran BST di DIY mencapai 80 persen hingga Sabtu (16/1) mendatang. Diharapkan program bansos dari pemerintah tersebut dapat menggerakkan perekonomian di DIY dengan adanya peredaran uang yang bisa dibelanjakan harus untuk kebutuhan pokok. Metode penyaluran BST dilakukan dengan tiga cara dan memanfaatkan teknologi digital yaitu Kantor Pos, komunitas di desa kecamatan hingga diantarkan langsung bagi KPM seperti lanjut usia, orang sakit hingga orang dengan gangguan jiwa.

"Tiga program bansos yang digulirkan pemerintah pusat meliputi PKH, sembako dan BST. Penyaluran PKH dan sembako semula tunai langsung ditransfer oleh Himpunan Bank-bank Milik

Negara atau Himbara seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri ke rekening masing-masing penerima. Khusus penyaluran BST akan dikirimkan Kantor Pos langsung ke alamat masing-masing KPM di DIY," imbuh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Endang Patminarsih.

Endang menuturkan total penyaluran bansos yaitu PKH sebanyak 196.232 KPM, sembako sebanyak 353.434 KPM dan BST sebanyak 120.787 KPM di DIY pada Januari 2021. Besar PKH yang disalurkan menyesuaikan beberapa komponen seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas hingga lanjut usia (lansia) antara Rp 75.000 sampai Rp 500 ribu.

Sedangkan bansos sembako akan mendapat Rp 200 ribu per KPM setiap bulan dan BST sebesar Rp 300 ribu per KPM setiap bulan. "Bansos ini diberikan dalam empat tahap selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Setiap KPM menerima uang tunai yang diberikan selama empat bulan berturut-turut terhitung sejak Januari hingga April 2021," imbuhnya. (Ira)-d

CAGAR BUDAYA DIKELOLA UPT KHUSUS

Tahap Awal Sasar Tugu Hingga Alun-alun

YOGYA (KR) - Mulai tahun ini kawasan cagar budaya di Kota Yogya dikelola secara khusus oleh unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Akan tetapi pada tahap awal baru menyasar kawasan Tugu hingga Alun-alun.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Ekwanto, menjelaskan total ada lima kawasan cagar budaya yakni Malioboro, Kraton Yogyakarta, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru. "Tahun ini masih dalam masa transisi sehingga pengelolaannya juga masih terbatas yaitu dari Tugu hingga Alun-alun di kawasan Kraton Yogyakarta," jelasnya, Minggu (10/1).

Dengan adanya UPT tersebut diharapkan pengelolaan kawasan cagar budaya bisa lebih maksimal. Anggaran dari danais juga dapat diakses secara lebih terpadu. Pola koordinasi antarbidang di tiap organisasi perangkat daerah pun semakin optimal. Harapannya, cagar budaya yang menjadi bagian dari ikon Kota Yogya menjadi lebih terkonsep.

Sebelumnya Pemkot Yogya memiliki UPT Malioboro di bawah Dinas Pariwisata untuk pengelolaan kawasan Malioboro. Akan tetapi lembaga tersebut dihapus dan kemudian dibentuk lembaga baru untuk pengelolaan

kawasan cagar budaya lebih luas. "Ada tambahan beberapa tugas sehingga saat ini ada dua seksi di UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yaitu pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Personelnya juga lebih banyak," imbuh Ekwanto.

Ekwanto menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan kawasan Tugu hingga Alun-alun selalu berada dalam kondisi bersih. Pihaknya pun tidak memanfaatkan jasa kebersihan dari pihak ketiga tetapi melakukan pembersihan sampah sendiri dengan tenaga yang dikontrak langsung. "Jika memanfaatkan jasa pihak ketiga kami terkadang mengalami kesulitan untuk mengatur kebutuhan penyapuan. Makanya kami mencoba mengontrak langsung supaya bisa memberikan tugas dengan lebih baik," katanya.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, sebelumnya berharap adanya lembaga baru tersebut maka pengelolaan kawasan cagar budaya bisa lebih optimal dan mendukung pariwisata. Dicontohkannya kawasan Kotabaru diharapkan dapat menjadi kawasan pendukung untuk wisata di Malioboro. Sehingga kawasan tersebut bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata premium layaknya Malioboro. (Dhi)-d

DPD PDI PERJUANGAN DIY

Peringati HUT Partai dengan 48 Tumpeng



KR-Hermianto

Nuryadi beserta pengurus dan 48 tumpeng dalam peringatan HUT PDI Perjuangan.

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DIY menggelar perayaan HUT ke-48 PDI Perjuangan dengan tema 'Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan, Buda-

yakan Gotong-Royong dalam mengatasi Pandemi', Minggu (10/1). PDI Perjuangan berkomitmen membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus terjadi.

Perayaan secara nasional acara digelar melalui Zoom Meeting dengan Pidato Politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan sambutan Presiden Joko Widodo. Seluruh Kader PDI Perjuangan dari tingkat pusat sampai dengan anak ranting dan simpatisan mengikuti zoom meeting sejak pukul 14.00 siang.

Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Nuryadi memimpin perayaan di kantor partai Jalan Tentara Rakyat Mataram. Di kantor tersebut, berkumpul para kader bersama 48 tumpeng yang menjadi simbol usia partai berlabang bangteng ini. (Fxb/Dev)-d